

**PILIHAN GANDA**

1. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bagian dari definisi manajemen pajak:
  - A. Usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan
  - B. **Upaya yang dilakukan oleh manajer pajak dalam memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dengan melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance*, sesuai kewenangannya**
  - C. Upaya manajer pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak dengan mematuhi aturan pajak, agar perusahaan tidak dikenakan sanksi Perpajakan
  - D. Upaya manajer pajak dalam mencari celah ketentuan perpajakan yang bertujuan untuk penghematan kewajiban pembayaran pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku
  
2. Di bawah ini yang bukan tugas dari Wajib Pajak atas kewajiban pajak adalah:
  - A. Tax Compliance
  - B. *Tax Research*
  - C. ***Tax Avoidance***
  - D. *Tax Litigation*
  
3. Salah satu fungsi dari manajemen pajak adalah:
  - A. ***Tax Control***
  - B. *Tax Research*
  - C. *Tax Avoidance*
  - D. *Tax Litigation*

4. Pajak bagi perusahaan memiliki risiko dan pengaruh. Salah satu risiko yang termasuk dalam risiko keuangan adalah:
- A. Ketidakpastian kebijakan pemerintah
  - B. Ketidakpastian ekonomi atas biaya depresiasi karena mesin usang atau tidak *up to date*
  - C. Ketidakpastian harga keluaran (output) dan biaya input
  - D. **Ketidakpastian biaya bunga**
5. Berikut ini adalah faktor pertimbangan pemilihan bentuk usaha dalam manajemen pajak:
- A. **Pengenaan tarif PPh**
  - B. Tingkat kerumitan suatu peraturan
  - C. Besarnya denda
  - D. Menghindari pemeriksaan pajak
6. Di bawah ini yang bukan merupakan kelebihan CV dalam perencanaan pajak adalah:
- A. Tidak ada ketentuan dalam memakai nama
  - B. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi
  - C. **Kewajiban sekutu yang tidak terbatas**
  - D. Relatif mudah dan murah proses pendiriannya
7. Kelebihan pemilihan badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dalam perencanaan pajak adalah:
- A. Kerumitan perizinan dan organisasi
  - B. Pembagian laba kepada pemegang saham tidak dikenakan PPh
  - C. **Jangka waktu tidak terbatas**
  - D. Besarnya biaya pengorganisasian perusahaan

MANAJEMEN PERPAJAKAN

8. Manakah yang merupakan kewajiban pajak dari suatu Perseroan Komanditer (CV):
- A. Terdapat *Economic Double Taxation*
  - B. Biaya gaji anggota sekutu dapat dibebankan sebagai biaya dan dikenakan PPh Pasal 21
  - C. Tidak boleh dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu
  - D. **Pembagian laba kepada partner/sekutu bukan merupakan objek pajak**
9. Kelemahan dari perusahaan perseorangan dari segi perpajakan adalah:
- A. Pajak yang berganda
  - B. **Tanggung jawab yang tidak terbatas**
  - C. Wajib melakukan pembukuan
  - D. Pengenaan tarif pajak tanggal
10. Pemilihan bentuk pendanaan sangat penting bagi perusahaan. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari pendanaan perusahaan adalah:
- A. Penggunaan Laba ditahan
  - B. **Penjualan aset**
  - C. Pinjaman kepada pihak ketiga (*debt financing*)
  - D. Penerbitan saham (*equity financing*)
11. Salah satu kelebihan pendanaan perusahaan melalui kegiatan *debt financing* adalah:
- A. Tidak ada pinjaman yang harus dibayar
  - B. Mendapat kontak bisnis maupun keahlian manajemen dari investor yang terlibat
  - C. **Mengurangi penghasilan kena pajak**
  - D. Pinjaman harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu dan ada biaya bunga

12. Salah satu bentuk dari perusahaan yang melakukan *factoring* adalah:
- A. Perusahaan pialang saham
  - B. Perusahaan anjak piutang**
  - C. Perusahaan terbuka (Tbk)
  - D. Perusahaan manajer investasi
13. Salah satu karakteristik dari perusahaan dengan bentuk subsidiaries disintegrasi adalah:
- A. Struktur perusahaan yang memiliki banyak *line* usaha di bawah satu kepemilikan
  - B. Dimungkinkan terjadi kompensasi kerugian horizontal antar unit bisnis
  - C. Pembebanan biaya alokasi kantor pusat bagi cabang yang berada di luar negeri dengan aturan dan tata cara yang berlaku pada negara tersebut
  - D. Memerlukan biaya *tax compliance* yang cukup tinggi**
14. Keuntungan dari pembiayaan melalui *onshore financing*, kecuali:
- A. Biaya yang dikeluarkan sedikit
  - B. Pengurangan pajak yang lebih besar**
  - C. Prosedur yang lebih mudah
  - D. Tidak dikenakan pajak berganda
15. Dalam penggabungan usaha, perusahaan memilih melakukan akuisisi aset berupa bangunan. Hal ini dilakukan agar dari sisi perpajakan, perusahaan terhindar dari PPh atas transaksi saham. Namun demikian perusahaan juga harus menilai seberapa besar tanggungan pajak lainnya, yang mungkin akan dikenakan dengan adanya akuisisi aset berupa bangunan. Jenis pungutan apa yang dimaksud:
- A. PBB
  - B. PPhTB
  - C. BPHTB**
  - D. PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan

16. Berikut ini yang bukan merupakan jenis-jenis penggabungan usaha menurut UU Pajak, yaitu:
- A. **Joint operation**
  - B. *Upstream merger*
  - C. *Penggabungan usaha horizontal*
  - D. *Downstream merger*
17. Bentuk restrukturisasi lainnya selain merger dan akuisisi dengan cara membeli saham di bursa ke private dengan menggunakan dana pinjaman adalah:
- A. *Sell off*
  - B. *Spin off*
  - C. *Joint operation*
  - D. **Leverage buy out (LBO)**
18. Untuk mencegah pengeluaran yang sangat besar, perusahaan asing sebelum mendirikan anak perusahaan di Indonesia seharusnya melakukan hal berikut:
- A. Mengakuisisi perusahaan di Indonesia
  - B. Melakukan *joint operation* dengan perusahaan di Indonesia
  - C. **Mendirikan BUT berupa perwakilan kantor dagang**
  - D. Melakukan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia untuk mendapat fasilitas

**MANAJEMEN PERPAJAKAN**

19. Apabila sebuah perusahaan di luar negeri akan lebih sering melakukan aktivitas usaha di Indonesia, maka pilihan *inbound investment* yang tepat adalah:
- A. *Joint operation*
  - B. *Subsidiary company***
  - C. Investasi pembelian saham publik
  - D. Deposito
20. Apabila terjadi *inbound investment*, maka azas pengenaan pajak yang dipakai atas hasil investasinya adalah:
- A. Asas penduduk
  - B. Asas sumber**
  - C. Asas kewarganegaraan
  - D. Asas *world wide income*
21. Tuan Yono WNI dan tinggal di Indonesia melakukan investasi di luar negeri dengan membeli sebuah apartemen di Negara Y. Apartemen tersebut disewakan dan menghasilkan penghasilan bagi Tuan Yono. Dimensi dan azas pemajakan apa, agar Tuan Yono dapat dikenakan pajak di Indonesia?
- A. Perpajakan internasional dan *source principle*
  - B. Perpajakan domestik dan *source principle*
  - C. Perpajakan internasional dan *residence principle***
  - D. Perpajakan internasional dan *citizenship*

22. Salah satu keuntungan usaha perseorangan dibanding bentuk usaha badan lainnya dari segi perpajakan adalah:
- A. Tanggung jawab tidak renteng
  - B. Tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak
  - C. Tidak wajib pembukuan apabila syarat dipenuhi**
  - D. Tarif pajak tunggal
23. Apabila dalam suatu keluarga, suami dan isteri melakukan pisah harta maka kewajiban pajaknya adalah sebagai berikut:
- A. Masing-masing harus memiliki NPWP, penghasilan neto suami dan isteri digabung dan penghitungan pajaknya dihitung secara proporsional**
  - B. Hanya cukup 1 NPWP dalam satu keluarga, penghasilan yang dihitung pajaknya hanya penghasilan suami., sedangkan penghasilan isteri dari 1 pemberi kerja dikenakan PPh Final
  - C. Hanya cukup 1 NPWP dalam satu keluarga, penghasilan isteri digabung dengan penghasilan suami dalam penghitungan pajaknya
  - D. Masing-masing harus memiliki NPWP, penghasilan neto suami dan isteri digabung dan penghitungan pajaknya juga digabung
24. Tuan Anto memiliki harta berupa tanah hasil warisan orang tuanya sejak tahun 2017 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya. Maka di tahun 2022 atas harta tersebut seharusnya dilakukan hal sebagai berikut:
- A. Dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 dan dibayarkan PPh PAS Final
  - B. Tidak perlu dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP karena bukan objek pajak
  - C. Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2017, dilaporkan di penghasilan bukan objek pajak dan bagian harta**
  - D. Pembetulan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2017, dilaporkan di penghasilan final transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan bagian harta

25. Tuan F memiliki Mobil yang masih dalam status kredit, maka untuk pelaporan harta mobil tersebut di SPT Tahunan PPh OP adalah:
- A. Harga perolehan mobil dilaporkan pada bagian harta, dan sisa kredit dilaporkan pada bagian utang**
  - B. Nilai mobil yang sudah dibayar melalui cicilan dilaporkan pada bagian harta, dan sisa kredit dilaporkan pada bagian utang
  - C. Nilai pasar mobil dilaporkan pada bagian harta, dan total pinjaman kredit dilaporkan pada bagian utang
  - D. Nilai mobil yang sudah dibayar melalui cicilan dilaporkan pada bagian harta, dan utang tidak perlu dilaporkan
26. PT X mempekerjakan Mr. Y dari Negara S sebagai pegawai tetap yang dikontrak selama 5 tahun. Besaran gaji yang diminta oleh Mr.Y dalam kontrak adalah sebesar Rp25.000.000/bulan bersih setelah pajak. Maka atas kontrak tersebut, formula yang tepat dalam metode pemotongan PPh Pasal 21 dalam perencanaan pajak adalah:
- A. *Net Method*
  - B. *Gross Up Method***
  - C. *Lump Sum Method*
  - D. *Reimbursement Method*
27. PT Z menggunakan jasa instalasi perangkat komputer kepada Tuan H untuk jangka waktu satu bulan. Atas jasa tersebut maka PT Z wajib memotong PPh Pasal:
- A. PPh Pasal 21**
  - B. PPh Pasal 22
  - C. PPh Pasal 23
  - D. PPh Pasal 4 ayat 2

28. Pada Bulan Maret 2023 Tuan A ber-NPWP menyewakan gudang yang dimilikinya selama dua bulan kepada PT H senilai Rp135.000.000 bersih tanpa pajak. Maka atas transaksi tersebut, biaya sewa yang akan dibebankan oleh PT H selama dua bulan tersebut adalah sebesar:
- A. Rp135.000.000
  - B. Rp121.500.000
  - C. Rp150.000.000**
  - D. Rp162.000.000
29. PT S mengimpor barang dari negara P berupa persediaan bahan baku dengan nilai impor sebesar Rp1.500.000.000,00 di bulan Oktober 2022. Atas impor tersebut, dikenakan pungutan PPh Pasal 22 impor. Untuk melakukan penghematan pajak, PT S harus memiliki angka pengenal impor (API). Berapakah selisih PPh Pasal 22 antara menggunakan API dengan tanpa menggunakan API:
- A. Rp37.500.000
  - B. Rp112.500.000
  - C. Rp22.500.000
  - D. Rp75.000.000**
30. PT K merupakan sebuah perusahaan penerbangan dalam negeri. PT X yang bergerak dibidang usaha perjalanan wisata akan mencharter salah satu pesawat milik PT K. Maka atas transaksi tersebut PT K akan memotong jenis pajak berikut:
- A. PPh Pasal 15 bersifat tidak final**
  - B. PPh Pasal 22
  - C. PPh Pasal 15 bersifat final
  - D. PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final

**ESAI**

1. Sebutkan dan jelaskan motivasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rules*): semakin rumit suatu aturan pajak maka orang makin cenderung untuk menghindar dari pajak, karena costnya tinggi (sewa jasa konsultan pajak).

Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*): makin tinggi pajak yang dibayar maka orang cenderung untuk mengurangnya.

Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*): Undang-undang dan aturan pendukung nya yang masih membuka celah (*loopholes*) bagi WP untuk melakukan perencanaan pajak.

Besarnya denda (*Size of Penalty*): Semakin tinggi atau tegas sanksi perpajakan yang berlaku atas pelanggar aturan pajak, maka masyarakat akan semakin takut melanggar aturan pajak tersebut.

Moral Masyarakat (*Ethical Dilemma*): Moral masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Sebutkan dan jelaskan Rangkaian Strategi dari *Tax Planning*.

*Tax Saving*: mencari alternatif pengenaan tarif pajak yang lebih rendah

*Tax Avoidance*: upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak: menggeser atau menunda pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Optimalisasi kredit pajak: memaksimalkan pengkreditan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menghindari pemeriksaan pajak: meminimalisir dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak.

Menghindari pelanggaran peraturan pajak: upaya menghindari sanksi perpajakan.

3. Sebutkan dan jelaskan Manajemen PPN yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak.
- Untuk mengetahui sejauh mana unit bisnis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN-nya, sesuai dengan peraturan perpajakan;
- Meminimalisir terjadinya risiko permasalahan perpajakan atas transaksi berkaitan dengan PPN;
- Meminimalisir sanksi perpajakan atas kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh unit bisnis untuk segera diperbaiki;
- Agar unit bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama dimasa yang akan datang;
- Mempersiapkan unit bisnis dalam menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus.
- Melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data/dokumen yang dikirimkan oleh unit bisnis;
- Meminta bukti dokumen pendukung untuk di teliti silang (*cross check*) terhadap objek PPN;
- Merekonsiliasi atau mengekualisasi data objek-objek pajak berupa pendapatan atau omset di ledger dengan SPT Masa PPN.

**STUDI KASUS**

PT XYZ NPWP: 01.999.999.8-415.000 yang beralamat di Jalan Purimoro 2 No. 23 BSD Serpong Tangerang Selatan Banten Kode Pos 15235, bergerak di bidang Jasa Konstruksi, Perdagangan Bahan Bangunan, dan Industri Batako. Berikut Laba Rugi Tahun 2022 PT XYZ:

**LABA RUGI PER 31 DES 2022**

URAIAN	LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL			
	KONSTRUKSI	PERDAGANGAN	INDUSTRI	KONSOLIDASI
<b>Peredaran usaha</b>				
Jasa Konstruksi	Rp 50.000.000.000			Rp 50.000.000.000
Ekspor			Rp 50.000.000.000	Rp 50.000.000.000
Penjualan barang		Rp 20.000.000.000	Rp 4.500.000.000	Rp 24.500.000.000
<b>Total Peredaran usaha</b>				<b>Rp 124.500.000.000</b>
<b>Beban/Harga Pokok Penjualan</b>				
Beban Langsung/Pembelian	Rp 44.739.300.000	Rp 16.900.000.000	Rp 33.000.000.000	Rp 94.639.300.000
Impor Barang			Rp 15.000.000.000	Rp 15.000.000.000
Persediaan awal	Rp -	Rp 2.400.000.000	Rp 4.500.000.000	Rp 6.900.000.000
Persediaan akhir	Rp -	Rp 2.350.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 7.350.000.000
<b>Beban/Harga Pokok Penjualan</b>	<b>Rp 44.739.300.000</b>	<b>Rp 16.950.000.000</b>	<b>Rp 47.500.000.000</b>	<b>Rp 109.189.300.000</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>Rp 5.260.700.000</b>	<b>Rp 3.050.000.000</b>	<b>Rp 7.000.000.000</b>	<b>Rp 15.310.700.000</b>
<b>Biaya Operasi dan Umum</b>				
1 Gaji, Premi Asuransi, dan Tunjangan	Rp 2.135.412.180	Rp 779.310.767	Rp 2.725.712.040	Rp 5.640.434.987
2 PPh 21 Ditanggung Perusahaan	Rp 210.062.350	Rp 53.135.250	Rp 296.554.900	Rp 559.752.500
3 Sewa	Rp 300.000.000	Rp 150.000.000	Rp 450.000.000	Rp 900.000.000
4 Perbaikan dan Pemeliharaan	Rp 110.000.000	Rp 75.000.000	Rp 145.000.000	Rp 330.000.000
5 Promosi dan Entertainment	Rp 90.000.000	Rp 10.000.000	Rp 123.000.000	Rp 223.000.000
6 PKB, PBB dan Bea Meterai	Rp 50.000.000	Rp 5.000.000	Rp 55.000.000	Rp 110.000.000
7 Telp/Fax/HP	Rp 100.000.000	Rp 70.000.000	Rp 122.000.000	Rp 292.000.000
8 Listrik/Air	Rp 200.000.000	Rp 100.000.000	Rp 236.000.000	Rp 536.000.000
9 Pajak dan Perijinan	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	Rp 115.000.000	Rp 265.000.000
10 Penyusutan	Rp 300.000.000	Rp 120.000.000	Rp 450.000.000	Rp 870.000.000
11 Sumbangan dan Bantuan	Rp 50.000.000	Rp 20.000.000	Rp 65.000.000	Rp 135.000.000
12 Natura	Rp 250.000.000	Rp 150.000.000	Rp 275.000.000	Rp 675.000.000
13 Royalti Luar Negeri	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	Rp 250.000.000	Rp 400.000.000
<b>Total Biaya Operasi dan Umum</b>	<b>Rp 3.995.474.530</b>	<b>Rp 1.632.446.017</b>	<b>Rp 5.308.266.940</b>	<b>Rp 10.936.187.487</b>
<b>Laba usaha</b>	<b>Rp 1.265.225.470</b>	<b>Rp 1.417.553.983</b>	<b>Rp 1.691.733.060</b>	<b>Rp 4.374.512.513</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>				
1 Dividen dari PT ABC (Saham 35%)				Rp 350.000.000
2 Pendapatan Sewa Mobil				Rp 125.000.000
3 Bunga Deposito				Rp 147.800.000
4 Keuntungan Penjualan Tanah				Rp 1.000.000.000
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>				<b>Rp 1.622.800.000</b>
<b>Laba neto sebelum pajak</b>				<b>Rp 5.997.312.513</b>

Data-data terkait perpajakan PT XYZ:

- a. Tahun Buku: Januari s.d Desember 2022.
- b. Jenis Usaha Pokok: Industri Batako dan Jenis usaha Sampingan: Jasa Konstruksi (Non-Klasifikasi) dan Perdagangan Bahan Bangunan.
- c. PT XYZ melakukan pembukuan yang terpisah atas masing kegiatan usaha yang dilakukan (Industri, Konstruksi, dan Perdagangan).
- d. Pembayaran Sewa seluruhnya dilakukan kepada PT DEF atas sewa gedung dengan metode pemotongan, tetapi PT DEF tidak setuju dan menginginkan net sejumlah Rp900 juta.
- e. Jasa perbaikan seluruhnya dilakukan kepada PT GHI atas perbaikan AC dengan metode pemotongan, tetapi PT GHI tidak setuju dan menginginkan net sejumlah Rp330 juta.
- f. Promosi dan Entertainment tidak terdapat daftar nominative.
- g. Biaya telpon/fax/HP termasuk biaya HP karyawan sebesar Rp175 juta.
- h. Biaya Natura dan kenikmatan: Beras, Kecap, Gula, (jika dinilai Harga Pasar) Rp150 juta dan Penyediaan Kesehatan Rp250 Juta, dan Fasilitas Kendaraan antar jemput Karyawan Rp275 Juta.
- i. Royalti dibayarkan kepada RST BNV di Caymant Island (merupakan *conduit company*) atas pemakaian merk.
- j. Metode penyusutan akuntansi yang digunakan adalah Garis Lurus dan metode persediaan yang digunakan adalah Metode Rata-Rata Persediaan.
- k. Dalam penyusutan terdapat unsur pajak masukan yang dimasukkan kedalam harga pokok perolehan aktiva.
- l. Untuk ekspor/impor perusahaan dapat memilih menggunakan kurs \$US (1\$US=Rp14.000)
- m. Atas pembelian barang untuk impor senilai \$US750,000 (Kurs 1\$US=Rp13.500,00) dari KLM Ltd di UK. Perusahaan tidak mempunyai API, tetapi perusahaan satu group PT KBN memiliki API. Tersedia juga jasa handling fee dari PT STU untuk pembelian ini sebesar 1,5% dari nilai impor dengan garansi barang atas nama sendiri.
- n. Pajak-pajak yang sudah dibayar atau di potong pihak lain PPh Pasal 25 Rp750 juta, PPh Pasal 23 Rp230 juta, PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp1,4 Milyar.

Berdasarkan data-data diatas, Saudara selaku Manajer Pajak PT XYZ diminta untuk membuat Manajemen Pajak sesuai asumsi masing-masing yang dapat memaksimalkan dan mengefisiensikan laba dan benefit untuk Perusahaan dan Karyawan.

**Jawaban:**

- PPh Pasal 22:
  - a. Untuk melakukan impor perusahaan sebaiknya memiliki API agar tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan lebih kecil yaitu 2,5%, dibandingkan yang tidak memiliki API sebesar 7,5%. Sehingga ada penghematan pajak sebesar 5%. Perusahaan juga dapat meminta perusahaan satu grup yang memiliki API untuk membantu melakukan impor, walaupun hal ini riskan untuk menjadi temuan dalam pemeriksaan pajak. Perusahaan juga dapat menggunakan Jasa Handling Fee untuk membantu impor barang.
  - b. Perusahaan harus selalu menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku saat melakukan Ekspor maupun Impor barang, agar tidak dilakukan koreksi oleh fiskus.
  - c. Perusahaan dapat mengurus Surat Keterangan Bebas PPh apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- PPh Pasal 23:
  - a. Perusahaan dapat melakukan metode gross -up bagi lawan transaksi yang memilih nilai bersih dalam suatu transaksi. Hal ini dilakukan agar biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya. Contoh transaksi jasa perbaikan yang dilakukan oleh PT GHI atas perbaikan AC, tetapi PT GHI tidak setuju dan menginginkan net sejumlah Rp330 juta. Maka dasar pengenaan pajaknya dapat dilakukan penghitungan gross-up sebesar Rp336.734.694,00 ( $100/98 \times \text{Rp}330 \text{ Juta}$ ).
  - b. Pastikan tarif yang digunakan sudah benar dan sesuai ketentuan perpajakan.
  - c. Perusahaan dapat mengurus Surat Keterangan Bebas PPh apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- PPh Pasal 26:
  - a. Sebaiknya pembayaran royalti ke negara tax heaven country dihindarkan, karena berpeluang untuk dikoreksi fiskal oleh fiskus.

**MANAJEMEN PERPAJAKAN**

- b. Sebaiknya membayar royalty ke negara yang sudah memiliki P3B/tax treaty dengan Indonesia untuk memperoleh keringanan tarif PPh Pasal 26.
- PPh Pasal 4 ayat 2:
  - a. Perusahaan dapat melakukan metode gross -up bagi lawan transaksi yang memilih nilai bersih dalam suatu transaksi. Hal ini dilakukan agar biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya. Contoh transaksi pembayaran sewa kepada PT DEF atas sewa gedung dengan metode pemotongan, tetapi PT DEF tidak setuju dan menginginkan net sejumlah Rp900 juta.. Maka dasar pengenaan pajaknya dapat dilakukan penghitungan gross-up sebesar Rp1 Milyar ( $100/90 \times \text{Rp}900 \text{ Juta}$ ).
  - b. Pastikan tarif yang digunakan sudah benar dan sesuai ketentuan perpajakan.
  - c. Pastikan perusahaan memiliki sertifikasi untuk usaha jasa konstruksi yang dilakukan dan membayar sendiri PPh Final Jasa Konstruksi atas transaksi yang tidak dilakukan pemotongan PPh.
- PPN:
  - a. Pastikan dilakukan rekonsiliasi antara omset PPh dan PPN, begitu juga perolehannya.
  - b. Pajak masukan (PM) yang dikapitalisasi ke dalam aktiva tetap sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya dikreditkan saja dengan Pajak Keluaran, kecuali PM atas aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.
  - c. Gunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku ketika melakukan ekspor maupun impor ketika menghitung dasar pengenaan pajak PPN.
  - d. Perusahaan dapat mengurus Surat Keterangan Bebas PPN Impor apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- PPh Badan:
  - a. Lakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku antara lain:
    - Koreksi fiskal negatif terhadap penghasilan final ( Jasa konstruksi, bunga deposito, dan penjualan tanah).
    - Koreksi fiskal negatif terhadap penghasilan yang bukan objek pajak (Dividen dalam negeri).

**MANAJEMEN PERPAJAKAN**

- Koreksi fiskal positif atas biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang bersifat final (Biaya sehubungan dengan jasa konstruksi).
  - Koreksi biaya yang tidak berhubungan dengan 3M (mendapat, memelihara, dan menagih) penghasilan dan biaya terkait Pasal 9 ayat 1 UU PPh.
- b. Buatlah daftar nominatif atas biaya promosi dan entertainment.
- c. Pastikan natura yang dibiayai dapat dikurangkan secara fiskal.
- d. Pastikan metode dan penghitungan penyusutan dan persediaan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini metode komersial perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan fiskal.
- e. Pastikan hanya PPh Pasal 25 dan Pasal 23 yang dapat dijadikan kredit pajak.